



## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E ,MM**  
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E,MM**

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**



**PERJANJIAN KINERJATAHUN 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                       | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                         | (3)                                                                                     | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif                                                                           | Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha                  | 95%    |
|     |                                                                                                                             | Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal                                               | 8%     |
|     |                                                                                                                             | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM                                            | 100%   |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                                                 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan             | 84,2   |
|     |                                                                                                                             | Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP                                               | 90%    |
| 3.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP                                                                                  | Nilai SAKIP DPMPTSP                                                                     | BB     |
| 4.  | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, dan tugas pokok jabatan. | Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan | 100%   |

|    | Program                                                       | Anggaran             | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi         | Rp. 14.636.670.411,- | APBD       |
| 2. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Rp. 576.800.392,-    | APBD       |
| 3. | Program Promosi Penanaman Modal                               | a. Rp. 188.471.000,- | APBD       |
|    |                                                               | b. Rp. 225.000.000,- | APBN       |
| 4. | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Rp. 651.975.050,-    | APBD       |
| 5. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | a. Rp. 109.095.728,- | APBD       |
|    |                                                               | b. Rp. 853.200.800,- | APBN       |
| 6. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp. 89.515.100,-     | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E,MM**

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**SEKRETARIS**

**JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750731 199603 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                              | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                       | (3)                                                                                                                                            | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP                                                                                | Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor                                                                                    | 100%   |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja DPMPTSP                                         | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja DPMPTSP Tepat Waktu                                                 | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DPMPTSP Sesuai Peraturan Yang Berlaku | Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DPMPTSP Tersusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu | 100%   |
| 4.  | Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aset Daerah DPMPTSP Sesuai Kebutuhan                                        | Persentase Terkelolanya Sarana dan Prasarana Aset Daerah DPMPTSP Yang Tersedia Sesuai Kebutuhan                                                | 100%   |
| 5.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dokumen Arsip DPMPTSP                                                                   | Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Arsip DPMPTSP Tepat Waktu                                                                           | 100%   |
| 6.  | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan DPMPTSP yang Tersusun Tepat Waktu                                                  | Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu                                                      | 100%   |


| Kegiatan                                                                     | Anggaran             | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 423.611.437,00   | APBD       |
| 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Rp. 277.170.700,00   | APBD       |
| 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 1.100.918.854,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

**Pihak Pertama,**  
**SEKRETARIS**

  
**JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19750731 199603 1 002**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **DASNIL, SH, M.Si**  
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

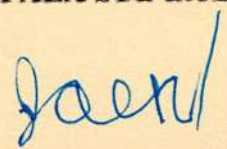
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,  
SEKRETARIS**

  
**JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750731 199603 1 002

**Pihak Pertama,  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM**

  
**DASNIL, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19651001 199703 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                      | Target         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                  | (3)                                                                                                    | (4)            |
| 1.  | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 42 Orang/Bulan |
| 2.  | Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 1 Dokumen      |
| 3.  | Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang sesuai dengan ketentuan                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 50 Orang       |
| 4.  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tepat waktu                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |
| 5.  | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tepat waktu                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        |
| 6.  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang tepat waktu                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket        |
| 7.  | Terlaksananya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang sesuai dengan ketentuan                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      |
| 8.  | Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang sesuai dengan ketentuan                                            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 4 Unit         |
| 9.  | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tepat waktu                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 3 Unit         |
| 10. | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang tepat waktu                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |
| 11. | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tepat waktu | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 7 Unit         |
| 12. | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tepat waktu                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 13 Unit        |



| <b>Sub Kegiatan</b>                                                                                                   | <b>Anggaran</b>      | <b>Keterangan</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Rp. 9.964.403.478,00 | APBD              |
| 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Rp. 511.310.000,00   | APBD              |
| 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | Rp. 177.170.700,00   | APBD              |
| 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Rp. 9.000.000,00     | APBD              |
| 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Rp. 72.218.800,00    | APBD              |
| 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Rp. 14.860.000,00    | APBD              |
| 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Rp. 372.718.364,00   | APBD              |
| 8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan                                                                    | Rp. 594.629.133,00   | APBD              |
| 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Rp. 506.289.721,00   | APBD              |
| 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik                                                           | Rp. 220.723.525,00   | APBD              |
| 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 151.920.448,00   | APBD              |
| 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Rp. 8.076.000,00     | APBD              |

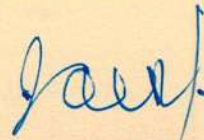
Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,  
SEKRETARIS**



**JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750731 199603 1 002

**Pihak Pertama,  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM**



**DASNIL, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19651001 199703 1 005





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ADE MASNIARY,SS**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,  
SEKRETARIS**

**JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750731 199603 1 002

**Pihak Pertama,  
PERENCANA AHLI MUDA**

**ADE MASNIARY,SS**  
Penata Tk.I  
NIP. 19791027 200502 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PERENCANA AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                    | (4)       |
| 1.  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang sesuai dengan Ketentuan               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun                                                                                                               | 1 Dokumen |
| 2.  | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berkualitas dan tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan |
| 3.  | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan Tepat Waktu          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                                                                                         | 1 Laporan |
| 4.  | Tersusunnya Laporan Keuangan DPMPTSP yang berkualitas                                                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun                                       | 1 Laporan |
| 5.  | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket   |
| 6.  | Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu yang tepat waktu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                | 1 Laporan |

| SubKegiatan                                                                              | Anggaran           | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp. 276.197.700,00 | APBD       |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 52.187.037,00  | APBD       |
| 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Rp. 95.226.700,00  | APBD       |
| 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp. 11.595.800,00  | APBD       |
| 5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Rp. 100.000.000,00 |            |
| 6. Fasilitas Kunjungan Tamu                                                              | Rp. 21.753.333,00  | APBD       |



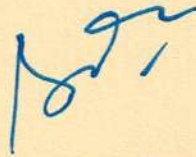
Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,  
SEKRETARIS**



**JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750731 199603 1 002

**Pihak Pertama,  
PERENCANA AHLI MUDA**



**ADE MASNIARY, SS**  
Penata Tk.I  
NIP. 19791027 200502 2 004





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **YENI YUSTINA,SE**  
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEUANGAN PUSAT  
DAN DAERAH**

  
**YENI YUSTINA, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19741018 200604 2 007




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH JUGA MELAKSANAKAN**  
**TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR KEUANGAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                        | Target     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                                    | (3)                                                                                                      | (4)        |
| 1   | Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 tepat waktu             | Jumlah Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau yang tersusun tepat waktu | 1 Laporan  |
| 2   | Terselesaikannya Dokumen Pencairan UP, GU, TU, LS dan NIHIL tepat waktu                                                | Jumlah Berkas SPM dan SPP UP, SPM GU, SPM TU, SPM LS dan SPM NIHIL dicetak dan diverifikasi              | 138 Berkas |
| 3   | Tersusunnya Laporan Bulanan Realisasi Keuangan Tahun 2023                                                              | Jumlah Laporan realisasi keuangan yang tersusun                                                          | 12 Laporan |
| 4   | Tersusunnya Dokumen surat pertanggung jawaban UP, GU, TU, LS yang terverifikasi sesuai ketentuan                       | Jumlah Berkas Pertanggung jawaban Kegiatan yang diverifikasi                                             | 112 Berkas |
| 5   | Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut LHP Pemeriksaan Reguler Inspektorat tepat waktu                                      | Jumlah Tindak Lanjut dari LHP yang tersusun tepat waktu                                                  | 4 Laporan  |
| 6   | Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi ,perjanjian kinerja ,tugas pokok jabatan | Jumlah laporan Penyelesaian penugasan /direktif pimpinan yang diselesaikan                               | 12 Konsep  |

Tanjungpinang, Januari 2023

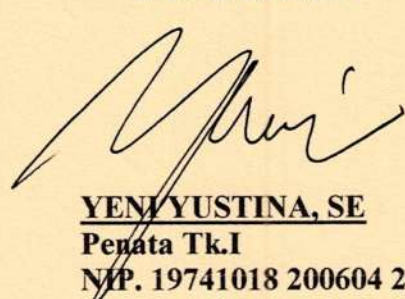
**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEUANGAN PUSAT  
DAN DAERAH**

  
**YENI YUSTINA, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19741018 200604 2 007





### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALFIAN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

**ALFIAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700713 199201 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


| No. | Sasaran                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           | Target           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                         | (4)              |
| 1   | Terlaksananya Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan aturan dan SOP                                                                                    | Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP                                                                                                                                                   | 90%              |
| 2   | Terlaksananya Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dan Penerbitan Perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP | Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi | 120 Pelaku Usaha |

| Sub Kegiatan                                                                                                                            | Anggaran          | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Rp. 54.601.000,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**ALFIAN, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19700713 199201 1 001**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASTHOFA DWI SULANTO**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

**ASTHOFA DWI SULANTO**  
Penata Tk.I  
NIP. 19750922 200604 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR VERIFIKASI DAN PEMANTAUAN NON PERIZINAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


| No. | Sasaran                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       | Target            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                     | (4)               |
| 1.  | Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha | 25 Kegiatan Usaha |

|    | Sub Kegiatan                                                              | Anggaran          | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Rp. 79.417.700,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

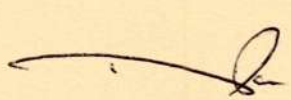
Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

Pihak Pertama,

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**ASTHOFA DWI SULANTO**  
Penata Tk.I  
NIP. 19750922 200604 1 010





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO FIRMAN NOORMANTO, SE, MM.**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **EMILIAWATI, S.Sos**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

**EMILIAWATI, S.Sos**

**Pembina**

**NIP. 19770422 199803 2 002**

**EKO FIRMAN NOORMANTO, SE, MM**

**Pembina**

**NIP. 19701117 200212 1 001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                               | Indikator Kinerja                                                                             | Target            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                                           | (4)               |
| 1   | Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 46 Kegiatan Usaha |

| Sub Kegiatan                           | Anggaran           | Keterangan |
|----------------------------------------|--------------------|------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | Rp. 48.999.200,00  | APBD       |
| Pelaksanaan Penanaman Modal            | Rp. 308.500.800,00 | APBN       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

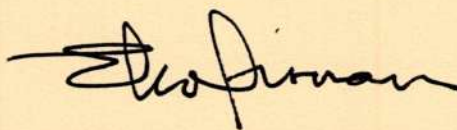
**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**



**EMILIAWATI, S.Sos**  
**Pembina**  
**NIP. 19770422 199803 2 002**



**EKO FIRMAN NOORMANTO, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19701117 200212 1 001**





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **EMILIAWATI, S.Sos**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**EMILIAWATI, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19770422 199803 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA JUGA MELAKSANAKAN TUGASE SEBAGAI**  
**KOODINATOR PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                   | Target    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                | (3)                                                                 | (4)       |
| 1   | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan                                                                                                | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM                        | 100%      |
| 2   | Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal terhadap Kepatuhan serta Kewajiban Perusahaan sesuai Ketentuan Kegiatan Usaha dan Peraturan perundang undangan | Jumlah Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan | 3 Laporan |

| Kegiatan                                                                         | Anggaran                                       | Keterangan   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | a. Rp. 109.095.728,00<br>b. Rp. 853.200.800,00 | APBD<br>APBN |

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**EMILIAWATI, S.Sos**  
**Pembina**  
**NIP. 19770422 199803 2 002**





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **HERRYSAN PUTRA,SE.Ak**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**HERRYSAN PUTRA,SE.Ak**  
Penata Tk.I  
NIP. 19740210 200312 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


| No. | Sasaran                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                | Target    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                                              | (4)       |
| 1.  | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan     | 3 Dokumen |
| 2.  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tepat waktu        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan |

| Sub Kegiatan                                                | Anggaran          | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Rp. 26.250.400,00 | APBD       |
| 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | Rp. 82.400.000,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
HASFARIZAL HANDRA, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
HERRYSAN PUTRA, SE.Ak  
Penata Tk.I  
NIP. 19740210 200312 1 006





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **IWAN SETIAGUNAWAN,SE**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

**IWAN SETIAGUNAWAN,SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19680424 199803 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DAN**  
**PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


| No. | Sasaran                                                                                             | Indikator Kinerja                                            | Target    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                 | (3)                                                          | (4)       |
| 1.  | Terlaksananya Peningkatan Keselarasan Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal | Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi | 100%      |
| 2.  | Tersusunnya Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usahan Provinsi                              | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi     | 1 Dokumen |

| Sub Kegiatan                                       | Anggaran           | Keterangan |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | Rp. 153.000.000,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**IWAN SETIAGUNAWAN, SE**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19680424 199803 1 003





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **JIAN AMANDA JUWITA,S.IP**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**JIAN AMANDA JUWITA, S.IP**  
**Penata**  
**NIP. 19870917 201101 2 007**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


| No. | Sasaran                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       | Target   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                     | (4)      |
| 1.  | Terselenggaranya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan serta Fasilitasi Layanan yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi | 20 Orang |

| Sub Kegiatan                                                                                                                 | Anggaran           | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Rp. 252.000.000,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**JIAN AMANDA JUWITA, S.IP**  
**Penata**  
**NIP. 19870917 201101 2 007**





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. MADSIHIT, ST, MH.**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**Dr. MADSIHIT, ST, MH**  
Pembina  
NIP. 19760206 200502 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                              | Indikator Kinerja                                                        | Target    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                  | (3)                                                                      | (4)       |
| 1.  | Terpenuhinya Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang tepat waktu                          | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                       | 1 Dokumen |
| 2.  | Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                            | 1 Laporan |
| 3.  | Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tepat waktu                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan     | 1 Laporan |
| 4.  | Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tepat waktu | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit    |

| Sub Kegiatan                                                    | Anggaran             | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                          | Rp. 33.347.248,00    | APBD       |
| 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Rp. 133.058.392,00   | APBD       |
| 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | Rp. 1.168.046.384,00 | APBD       |
| 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. 33.347.248,00    | APBD       |


Tanjungpinang, Januari 2023

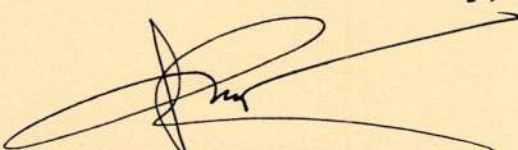
**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

  
**Dr. MADSIHIT, ST, MH**  
**Pembina**  
**NIP. 19760206 200502 1 002**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **MUHAMMAD FIRMANSYAH, SE, MM.**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

**MUHAMMAD FIRMANSYAH, SE, MM.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19800103 201101 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANLIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SUB**  
**KOORDINATOR KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                           | Target    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                         | (4)       |
| 1.  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanaman Modal yang berkaitan dengan Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi | 1 Dokumen |

| Sub Kegiatan                                                                 | Anggaran           | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Rp. 160.971.500,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**MUHAMMAD FIRMANSYAH, SE, MM.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19800103 201101 1 002





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **NOSY SYARFITA,S.Sos**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **EMILIAWATI, S.Sos**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

**EMILIAWATI, S.Sos**  
**Pembina**  
**NIP. 19770422 199803 2 002**

**NOSY SYARFITA,S.Sos**  
**Penata Tk.I**  
**NIP. 19751125 200803 2 001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                             | Target            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                                                                           | (3)                                                                                           | (4)               |
| 1   | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Pemantauan dan Fasilitasi Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan | 11 Kegiatan Usaha |
| 2   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan              | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                    | 382 Pelaku Usaha  |

| Sub Kegiatan                                                       | Anggaran            | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. 165.302.000, 00 | APBN       |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Rp. 60.096.528, 00  | APBD       |
|                                                                    | Rp. 379.378.000, 00 | APBN       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
EMILIA WATI, S.Sos

Pembina

NIP. 19770422 199803 2 002

  
NOSY SYARFITA, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19751125 200803 2 001





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **PUTU WIRASATA, SE.ME**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**PUTU WIRASATA, SE, ME.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780505 200212 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


| No. | Sasaran                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           | Target          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                         | (4)             |
| 1   | Terlaksananya Pelayanan Non Perizinan yang sesuai dengan aturan dan SOP                                                                                    | Persentase Pelayanan Non Perizinan Sesuai SOP                                                                                                                                               | 90%             |
| 2   | Terlaksananya Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dan Penerbitan Perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 20 Pelaku Usaha |

| Sub Kegiatan                                                                                                                            | Anggaran          | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Rp. 41.184.850,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**PUTU WIRASATA, SE, ME.**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19780505 200212 1 008





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **RIA PURWANTARI, ST. M.Si**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**RIA PURWANTARI, ST. M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19711107 200212 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**KOORDINATOR PROMOSI PENANAMAN MODAL**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                       | Indikator Kinerja                                              | Target    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                           | (3)                                                            | (4)       |
| 1.  | Terlaksananya Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Promosi Penanaman Modal                    | Persentase Kenaikan Minat Penanaman Modal                      | 8%        |
| 2.  | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi | 1 Dokumen |

| Sub Kegiatan                                                     | Anggaran           | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Rp. 188.471.000,00 | APBD       |
|                                                                  | Rp. 225.000.000,00 | APBN       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**RIA PURWANTARI, ST. M.Si**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19711107 200212 2 004**





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **RISMA RINI,S.STP,M.MPub**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Madya**

selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

**RISMA RINI,S.STP,M.MPub**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19790604 199711 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**KOORDINATOR PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN DATA**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No  | Sasaran                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                 | Target    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                 | (3)                                                                                               | (4)       |
| 1.  | Terlaksananya Peningkatan Keselarasan Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal | Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha                            | 95%       |
| 2.  | Tersusunnya Dokumen Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha tepat waktu                  | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen |

| Sub Kegiatan                                                                                            | Anggaran           | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp. 423.800.392,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

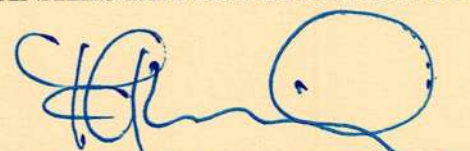
**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA**

  
**RISMA RINIS, STP, M.MPub**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19790604 199711 2 001





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ROCKY HARYONO, MH**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

**ROCKY HARYONO, MH**  
Penata Tk. I / III d  
NIP. 19830709 200904 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KOORDINATOR VERIFIKASI DAN PEMANTAUAN PERIZINAN**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        | Target            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                      | (4)               |
| 1   | Terselaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Penanaman Modal yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi | 30 Kegiatan Usaha |

| Sub Kegiatan                                                                 | Anggaran           | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Rp. 120.362.677,00 | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

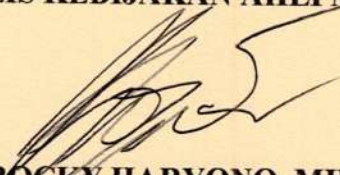
Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

Pihak Pertama,

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**ROCKY HARYONO, MH**  
Perata Tk. I / III d  
NIP. 19830709 200904 1 001





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **WAN AGUSTARWINA, SS**  
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2023


**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690329 199003 1 009

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**WAN AGUSTARWINA, SS**  
Penata Tk.I  
NIP. 19760811 201001 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI**  
**SUB KORDINATOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL**  
**DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


| No  | Sasaran                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                    | (4)       |
| 1   | Terlaksananya Peningkatan Keselarasan Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal        | Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau                                                                                        | 100%      |
| 2   | Tersusunnya Dokumen Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen |

| Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Anggaran            | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Rp. 89.515.100,00,- | APBD       |

Tanjungpinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690329 199003 1 009**

**Pihak Pertama,**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

  
**WAN AGUSTARWINA, SS**  
**Penata Tk.I**  
**NIP. 19760811 201001 2 005**